

Perkembangan dan Dinamika Pendidikan Islam di Malaysia: Analisis Historis dan Kontemporer

Adi Kusuma Pramesta^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

*Penulis Korespondensi: adi.kusuma24@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract. *This article provides a comprehensive overview of the development and contemporary dynamics of Islamic education in Malaysia. It traces the historical origins from the Malaccan Sultanate and the traditional pondok system to the structured madrasah model influenced by Middle Eastern graduates. The study analyzes the significant impact of British colonial policy and the post-independence state-driven centralization, which has progressively integrated Islamic education into the national curriculum. The article further examines the contemporary landscape, highlighting the roles of various types of schools, such as National Secondary Religious Schools (SMKA) and Community Religious Schools (SAR), and the government's policy of centralization. Key contemporary challenges are explored, including the need to balance Islamic values with globalization and digital transformation, the politicization of Islamic education between the ruling UMNO and the opposition PAS, and the imperative for curriculum modernization. The article argues that while Malaysia has been a pioneer in developing a robust and integrated Islamic education system, the future of the system lies in navigating the tensions between preserving its core Islamic identity and adapting to the challenges of modernity and technological change.*

Keywords: *Islamic Education, Malaysia, Pondok, Madrasah, Curriculum Centralization, Educational Policy, Islamic Revivalism*

Abstrak. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan dan dinamika kontemporer pendidikan Islam di Malaysia. Artikel ini menelusuri asal-usul historisnya dari masa Kesultanan Malaka dan sistem pondok tradisional hingga model madrasah terstruktur yang dipengaruhi oleh lulusan Timur Tengah. Studi ini menganalisis dampak signifikan dari kebijakan kolonial Inggris dan sentralisasi yang digerakkan oleh negara pasca-kemerdekaan, yang secara progresif telah mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam kurikulum nasional. Artikel ini selanjutnya mengkaji lanskap kontemporer, menyoroti peran berbagai jenis sekolah, seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Rakyat (SAR), serta kebijakan sentralisasi pemerintah. Tantangan kontemporer utama dieksplorasi, termasuk kebutuhan untuk menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan globalisasi dan transformasi digital, politisasi pendidikan Islam antara partai berkuasa UMNO dan PAS oposisi, serta imperatif untuk modernisasi kurikulum. Artikel ini berargumen bahwa meskipun Malaysia telah menjadi pelopor dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang kokoh dan terintegrasi, masa depan sistem ini terletak pada menavigasi ketegangan antara melestarikan identitas Islam intinya dan beradaptasi dengan tantangan modernitas dan perubahan teknologi.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Malaysia, Pondok, Madrasah, Sentralisasi Kurikulum, Kebijakan Pendidikan, Kebangkitan Islam*

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Islam di Malaysia memiliki posisi sentral dan signifikan secara historis, setelah berevolusi dari awal yang sederhana menjadi komponen yang canggih dan terintegrasi dengan baik dari sistem pendidikan nasional (Hamid, 2010b). Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, perkembangan sistem ini merupakan studi kasus yang menarik tentang bagaimana sebuah negara pasca-kolonial menavigasi hubungan kompleks antara tradisi agama, identitas nasional, dan modernisasi. Artikel ini bertujuan

untuk memberikan analisis historis dan kontemporer tentang pendidikan Islam di Malaysia, mengeksplorasi asal-usulnya, dampak kolonialisme dan kemerdekaan, strukturnya saat ini, dan tantangan utama yang dihadapinya di abad ke-21.

Sejarah pendidikan Islam di wilayah ini dimulai pada masa Kesultanan Malaka (1414-1511), di mana para penguasanya sendiri menunjukkan antusiasme terhadap pembelajaran Islam (Abdul Hamid, 2017). Lembaga formal awal, yang dikenal sebagai pondok (secara harfiah berarti "gubuk"), adalah sekolah asrama tempat para siswa berkumpul di sekitar seorang guru terhormat atau tok guru untuk mempelajari teks-teks Islam (Saputra dkk., 2022). Sistem tradisional ini, yang menekankan hafalan dan pembelajaran tidak terstruktur, berfungsi sebagai fondasi pendidikan Islam selama berabad-abad.

Bentuk kontemporer pendidikan Islam di Malaysia adalah hasil dari beberapa perubahan historis dan politik utama. Ini termasuk transformasi dari pondok tradisional ke sistem madrasah terstruktur pada abad ke-20, akomodasi bertahap mata pelajaran Islam ke dalam sistem pendidikan nasional pasca-kemerdekaan, dan politisasi Islam serta kurikulumnya yang meningkat di era modern. Makalah ini akan menganalisis fase-fase ini, diakhiri dengan pemeriksaan struktur saat ini dan tantangan yang muncul terkait globalisasi, perubahan teknologi, dan keinginan untuk modernisasi yang mempertahankan nilai-nilai inti tradisi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research) sebagai strategi utamanya. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa peristiwa dan fenomena masa lampau yang hanya dapat diakses melalui dokumen-dokumen tertulis, bukan melalui observasi lapangan atau wawancara langsung. Untuk mengurai dan merekonstruksi sejarah pendidikan Islam di Malaysia secara akurat, penelitian ini menerapkan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan prosedural yang saling terkait dan berkesinambungan.

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu kegiatan pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dan kredibel. Sumber-sumber yang dihimpun mencakup berbagai jenis literatur, seperti buku yang membahas sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara,

artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional yang terbit di JSTOR, serta jurnal-jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 2 yang memiliki reputasi akademik yang mapan. Pemilihan sumber-sumber ini dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan otoritas keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yang terbagi menjadi dua dimensi penting, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Pada dimensi eksternal, dilakukan pemeriksaan terhadap aspek fisik dan formal sumber seperti keaslian dokumen, tahun terbit, edisi, serta latar belakang penerbit untuk memastikan bahwa sumber tersebut bukanlah hasil pemalsuan atau terjemahan yang menyimpang. Sementara pada dimensi internal, dilakukan penelaahan mendalam terhadap isi dan substansi tulisan, dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesamaan narasi, konsistensi fakta, serta tidak adanya kontradiksi yang berarti di antara satu sumber dengan sumber lainnya. Langkah ini sangat krusial untuk menyaring informasi yang bersifat subjektif atau tendensius, sehingga hanya data-data yang memiliki derajat objektivitas tinggi yang dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses penafsiran dan pemaknaan terhadap fakta-fakta sejarah yang telah lolos verifikasi. Pada tahap ini, peneliti tidak sekadar menyusun ulang peristiwa secara kronologis, melainkan berupaya mencari hubungan kausalitas antarperistiwa, menarik benang merah dari berbagai data yang tampak terpisah, dan menyusun kerangka pemahaman yang utuh mengenai dinamika perkembangan pendidikan Islam di Malaysia—mulai dari era Kesultanan Malaka, pengaruh kolonialisme, hingga kebijakan kontemporer pasca-kemerdekaan. Verifikasi ulang terhadap data juga dilakukan pada tahap ini untuk memastikan bahwa setiap simpulan yang ditarik benar-benar berdasar pada bukti-bukti yang kuat dan tidak melompati fakta.

Tahap keempat dan terakhir adalah historiografi, yakni penulisan sejarah yang disajikan dalam bentuk narasi akademik yang sistematis, kronologis, dan argumentatif. Seluruh temuan yang telah melalui proses heuristik, kritik, dan interpretasi kemudian dituliskan ke dalam sebuah karya ilmiah yang koheren, dengan memperhatikan kaidah-kaidah penulisan sejarah yang berlaku seperti penggunaan bahasa yang lugas, pengutipan

yang akurat, serta penyertaan referensi yang lengkap dan dapat ditelusuri kembali. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini bukanlah sekadar kumpulan fakta belaka, melainkan sebuah rekonstruksi sejarah yang kritis, reflektif, dan mampu memberikan kontribusi berarti bagi khazanah keilmuan tentang pendidikan Islam di Malaysia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia

Sistem Pondok Tradisional

Pendidikan Islam formal yang pertama kali tercatat di wilayah yang kelak menjadi bagian dari Malaysia modern bermula pada masa Kesultanan Malaka, sekitar tahun 1414 hingga 1511 Masehi. Pada periode ini, Malaka tidak hanya berfungsi sebagai pelabuhan dagang internasional, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat keilmuan yang menarik para ulama dan pencari ilmu dari berbagai penjuru dunia (Saputra dkk., 2022).

Sistem pendidikan yang dominan pada waktu itu dikenal dengan nama sistem pondok. Keunikan sistem ini terletak pada kesederhanaannya yang jauh dari kemewahan arsitektur atau fasilitas canggih. Sebaliknya, ia mengedepankan suasana spiritual yang kental dan hubungan personal yang erat antara guru dan murid. Sang guru, yang lazim dipanggil tok guru atau tuan guru, bukan sekadar pengajar, melainkan juga tokoh karismatik yang menjadi panutan moral, rujukan spiritual, dan pemimpin komunitas. Karena kewibawaannya, seorang tok guru sering kali menarik puluhan bahkan ratusan murid dari berbagai daerah.

Para pelajar, yang disebut sebagai anak murid, menjalani kehidupan sehari-hari dengan pola yang sangat sederhana dan komunal. Mereka biasanya bertempat tinggal di gubuk-gubuk kecil atau bilik-bilik kayu yang didirikan di sekitar lingkungan rumah tok guru, di halaman masjid, atau di surau tempat belajar berlangsung. Pola ini menciptakan ekosistem pendidikan yang mirip dengan "pondok pesantren" atau "zawiyah" di mana kehidupan sehari-hari, ibadah, dan pengajian berjalan dalam satu kesatuan yang utuh dan saling menopang.

Metode pengajaran yang digunakan adalah tadah kitab. Dalam metode ini, tok guru akan membacakan dan mengulas secara mendalam teks-teks klasik berbahasa Arab yang dikenal sebagai kitab kuning karya monumental para ulama terdahulu yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Para murid tidak hanya mendengarkan, tetapi juga diwajibkan menghafal, mencatat, dan kerap kali mengulang kembali bacaan tersebut. Interaksi ini bersifat dialogis: murid dapat bertanya, menyanggah, atau meminta penjelasan tambahan, sehingga terjadi proses tanya-jawab yang dinamis meskipun dalam suasana yang khusyuk.

Salah satu ciri khas sistem pondok yang cukup kontras dengan pendidikan modern adalah ketiadaan jenjang kelas berdasarkan usia. Di dalam satu ruang pengajian, dapat duduk berdampingan remaja belia, pemuda, hingga orang tua yang telah berkeluarga semua belajar bersama dengan ritme dan kemampuan masing-masing. Pun demikian, tidak ada ujian tertulis atau ujian formal yang baku. Keberhasilan seorang murid dalam menyerap ilmu lebih diukur melalui penguasaan lisan, hafalan, serta perubahan perilaku dan akhlak yang tampak dalam kesehariannya.

Sertifikasi keahlian atau kelulusan diberikan melalui testimonial sederhana yang disebut dengan ijazah atau surat pengakuan dari tok guru. Surat ini biasanya berisi pernyataan bahwa sang murid telah menyelesaikan pengkajian atas kitab-kitab tertentu dan diizinkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Nilai dari ijazah ini lebih bersifat simbolis dan spiritual, sangat bergantung pada martabat dan kredibilitas tok guru yang mengeluarkannya, bukan pada prosedur administratif semata.

Adapun kurikulum yang diajarkan sangat terfokus pada ilmu-ilmu keislaman klasik, dengan penekanan utama pada:

1. Fiqih, terutama mazhab Syafi'i yang dominan di kawasan ini, untuk mengatur aspek ibadah, muamalah, dan hukum keluarga.
2. Ilmu Kalam (teologi), guna memperkuat keyakinan tentang keesaan Tuhan, kenabian, dan hal-hal gaib berdasarkan dalil naqli dan aqli.
3. Tasawuf (misticisme Islam), yang membimbing murid menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan batin dan akhlak mulia.

4. Tata bahasa Arab (nahwu dan sharaf), sebagai alat bantu fundamental untuk memahami teks-teks suci dan literatur klasik tanpa ketergantungan pada terjemahan.

Secara lebih luas, sistem pondok pada era Malaka ini bukanlah sekadar lembaga pendidikan, melainkan juga agen sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Islam yang beradaptasi dengan tradisi lokal. Melalui pendekatan yang sederhana, personal, dan berbasis komunitas, ia berhasil mencetak generasi ulama, penghafal Al-Qur'an, dan cendekiawan Muslim yang kelak menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara, bahkan hingga ke kawasan Melayu-Indonesia, Pattani, dan Brunei. Warisan sistem ini masih dapat dilacak jejaknya dalam model pesantren dan madrasah tradisional di Malaysia dan Indonesia hingga saat ini.

Transformasi Sistem Madrasah dan Pengaruh Kolonial

Sistem pondok tradisional mengalami transformasi signifikan pada awal abad ke-20 karena pengaruh lulusan dari institusi Timur Tengah seperti Universitas Al-Azhar di Kairo. Generasi baru cendekiawan ini memperkenalkan sistem nizami (terstruktur) menggantikan model umum yang tidak terstruktur dengan ruang kelas formal, pembagian berdasarkan usia, ujian tertulis, dan kurikulum yang lebih beragam yang mencakup mata Pelajaran modern atau sekuler. Munculnya madrasah modern ini bertepatan dengan gerakan sosial-politik yang lebih luas yang dikenal sebagai kaum muda, yang bertujuan untuk mereformasi praktik dan Pendidikan Islam (Syarif dkk., 2024).

Dimasa kolonial Inggris, kebijakan administrasi Pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk lintasan Pendidikan Islam. Tidak seperti Belanda di Indonesia yang meminggirkan Pendidikan Islam, Inggris mengkomodifikasinya, mengintegrasikan beberapa komponen Islam ke dalam sistem sekolah Melayu untuk mendapatkan penerimaan di kalangan Masyarakat. Namun, pada akhirnya pemerintahan kolonial membatasi ruang lingkup dan pendanaan mata Pelajaran Islam, menciptakan sistem yang sering dilakukan secara terpisah pada sore hari. Kebijakan ini secara paradoks membantu menstandarisasi dan melestarikan bentuk pendidikan Islam sambil memastikannya tetap berada di bawah kurikulum kolonial sekuler (Saputra dkk., 2022).

Integrasi dan Sentralisasi Pendidikan Pasca Kemerdekaan Malaysia

Menyusul kemerdekaan Malaya pada tahun 1957, posisi pendidikan Islam secara konstitusional dilindungi. Pasal 3 Konstitusi Federal mengakui Islam sebagai agama Persekutuan, dan Pasal 12 mengizinkan Persekutuan atau negara bagian untuk mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga Islam. Laporan Razak tahun 1956 yang penting merekomendasikan agar pengajaran agama disediakan di setiap sekolah dengan minimal 15 murid Muslim. Ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1961, yang menjadikan pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran inti di sekolah dasar dan menengah pemerintah. Integrasi ini, bagaimanapun, menyebabkan penurunan paralel dalam pendaftaran di sekolah-sekolah Islam negeri dan swasta, karena orang tua Melayu memilih kurikulum nasional yang lebih komprehensif yang menawarkan prospek profesional yang lebih baik (Hamid, 2010b).

Proses sentralisasi dipercepat pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pembentukan Divisi Pendidikan Agama (*Bahagian Pelajaran Agama*) di dalam Kementerian Pendidikan pada tahun 1973 (kemudian berganti nama menjadi Bahagian Pendidikan Islam atau BPI) menandai langkah signifikan menuju koordinasi federal. Pengambilalihan berikutnya dari beberapa sekolah agama negeri dan konversinya menjadi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) memastikan kurikulum yang seragam di bawah kendali federal. Tren sentralisasi ini digambarkan oleh Ahmad Fauzi Abdul Hamid sebagai ciri khas era pasca-kemerdekaan, di mana homogenisasi pendidikan Islam dikejar untuk menyelaraskan dengan kepentingan politik UMNO yang berkuasa. Langkah ini memiliki efek ganda: menciptakan jalur pendidikan yang seragam dan disetujui negara yang sering mengarah pada karir di birokrasi agama yang tersentralisasi, dan secara efektif membatasi pengaruh sekolah-sekolah Islam independen, yang banyak di antaranya terkait dengan partai Islam oposisi, PAS (Hamid, 2010a).

Dukungan Negara Terhadap Pendidikan

Pemerintah Malaysia memberikan dukungan terhadap Pendidikan di negaranya. Bagi mereka, Pendidikan adalah hak bagi warga negara yang harus dipenuhi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa institusi Pendidikan di Malaysia dikelola oleh Bahagian Pendidikan

Islam (BPI) dan Kementerian Pendidikan. Berikut jenis-jenis sekolah yang dikelola oleh pemerintah Malaysia:

Pendidikan Islam yang Didanai Negara:

1. Sekolah Kebangsaan: Pendidikan Islam disampaikan sebagai mata pelajaran wajib, *Pendidikan Islam*, bagi siswa Muslim. Ini adalah bagian dari kurikulum berorientasi nilai yang dirancang untuk mengembangkan siswa secara moral dan spiritual di samping pembelajaran akademis mereka.
2. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA): Ini adalah sekolah yang sepenuhnya didanai pemerintah yang menggunakan kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran agama dan akademis. Siswa dapat memilih dari berbagai aliran (seni, sains, teknik-kejuruan) sambil juga mengambil mata pelajaran agama inti seperti Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Syariah Islam, dan Bahasa Arab Tinggi.
3. Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN): Dikelola oleh pemerintah negara bagian, sekolah-sekolah ini mempertahankan otonomi kelembagaan yang lebih besar dan sering memiliki hubungan historis yang kuat dengan tradisi *pondok*.

Pendidikan Islam yang Didanai Swasta:

1. Sekolah Agama Rakyat (SAR): Diatur oleh dewan independen dan didanai melalui biaya siswa dan kontribusi swasta, sekolah-sekolah ini sering dianggap sebagai penerus *pondok* tradisional. Namun, mereka menghadapi tantangan signifikan, terutama setelah penarikan hibah pemerintah pada tahun 2002, yang menyebabkan banyak dari mereka menerima status "bantuan pemerintah" (SABK), yang mendorong pengaruh negara yang lebih besar.
2. Sekolah Agama Swasta (SAS): Biasanya terletak di daerah perkotaan dan melayani orang tua kelas menengah yang sadar Islam, sekolah-sekolah ini terdaftar di bawah Undang-Undang Pendidikan 1996, menawarkan alternatif berkualitas tinggi untuk sistem arus utama.

Tantangan Pendidikan Islam di Malaysia

1. Sentralisasi Oleh Kementerian Pendidikan: Tren utama sentralisasi di bawah kendali Kementerian Pendidikan telah dikritik karena menciptakan kurikulum yang kaku dan homogen yang menghambat keragaman pemikiran dan praktik. Kontrol birokratis ini meluas ke pelatihan guru, konten kurikulum, dan bahkan sertifikasi lulusan. Sistem ini digambarkan dirancang untuk menghasilkan pejabat agama yang patuh dan setia kepada negara daripada membina pemikir agama yang kritis dan independent.
2. Politisasi: Pendidikan Islam di Malaysia sangat dipolitisasi, membentuk arena kontestasi utama antara UMNO yang berkuasa dan PAS oposisi. PAS secara historis menarik dukungan akar rumput yang kuat dari jaringan pondok dan SAR (Hamid, 2010). Dengan menyerap dan mensentralisasi sekolah-sekolah independen ini ke dalam sistem nasional, UMNO berupaya melemahkan basis PAS. Dinamika politik ini, telah mengubah pendidikan Islam menjadi alat untuk konsolidasi politik daripada ruang independen untuk memupuk iman.
3. Modernisasi dan Transformasi Digital: Laju globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat menghadirkan peluang dan tantangan. Sementara publik Malaysia menunjukkan dukungan kuat untuk mengintegrasikan alat digital dan membahas isu-isu kontemporer seperti etika digital ke dalam pendidikan Islam, hambatan signifikan tetap ada. Studi menunjukkan bahwa banyak guru pendidikan Islam kekurangan pelatihan dan kompetensi yang memadai untuk secara efektif menerapkan transformasi digital dalam pengajaran mereka. Kesenjangan keterampilan ini, ditambah dengan kurikulum yang sering kesulitan mengikuti harapan masyarakat modern, merupakan hambatan kritis untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang relevan dan menarik bagi siswa saat ini (Ambya dkk., 2025).
4. Kualitas dan Profesionalisme Guru: Efektivitas pendidikan Islam sering dirusak oleh masalah yang berkaitan dengan kualitas guru. Seorang guru harus memiliki keyakinan mereka akan kemampuan mengajar mereka sendiri sebagai faktor kritis. Guru bertindak sebagai mediator penting, menghubungkan kepercayaan

dalam komunitas sekolah dengan efikasi diri guru yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa membina lingkungan kolaboratif dan saling percaya di dalam sekolah sangat penting untuk meningkatkan pengembangan profesional dan, pada akhirnya, efektivitas guru pendidikan Islam. Tanpa struktur pendukung seperti itu, bahkan kurikulum yang dirancang dengan baik mungkin gagal mencapai hasil yang diinginkan.

4. KESIMPULAN

Artikel ini telah menelusuri perjalanan penting pendidikan Islam di Malaysia, dari akar tradisionalnya dalam sistem *pondok* hingga bentuknya saat ini sebagai komponen yang sangat terstruktur dan tersentralisasi dari sistem pendidikan nasional. Perkembangan sistem ini sangat dibentuk oleh transisi historis dari patronase Kesultanan Malaka, hingga akomodasi kolonial Inggris, dan akhirnya dorongan pasca-kemerdekaan untuk integrasi nasional. Sentralisasi ini, sambil menciptakan kurikulum Islam yang seragam dan dapat diakses secara luas, juga menyebabkan tantangan terkait politisasi, stagnasi intelektual, dan potensi kurangnya inovasi pedagogis.

Masa depan pendidikan Islam di Malaysia bergantung pada menavigasi beberapa ketegangan kritis. Sistem harus menemukan cara untuk merangkul kemajuan teknologi dan membahas isu-isu global kontemporer tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai Islam intinya. Sistem ini juga harus mendamaikan keinginan negara untuk identitas nasional yang bersatu dengan manfaat intelektual dari keragaman dan kebebasan akademis. Untuk berhasil menavigasi tantangan ini dan membangun sistem pendidikan Islam yang lebih tangguh dan dinamis, penting untuk memberdayakan guru, mengintegrasikan teknologi, dan memodernisasi kurikulum.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid, A. F. (2017). Islamic Education in Malaysia. Dalam J. Voogt, G. Knezek, R. Christensen, & K.-W. Lai (Ed.), *Second Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education* (hlm. 1–17). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53620-0_27-1
- Ambya, R., Erihadiana, M., Priatna, T., & Muh Nasir, T. (2025). Modernization and National Identity: Quantitative Insights into the Role of Islamic Education in

- Malaysia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(1).
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i1.6611>
- Hamid, A. F. A. (2010a). *ISLAMIC EDUCATION IN MALAYSIA: (ISLAMIC EDUCATION IN MALAYSIA*, hlm. 25–43). S. Rajaratnam School of International Studies. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/resrep05898.6>
- Hamid, A. F. A. (2010b). *THE CONTEMPORARY SETTING: (ISLAMIC EDUCATION IN MALAYSIA*, hlm. 44–56). S. Rajaratnam School of International Studies. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/resrep05898.7>
- Saputra, K. D., Mughni, F. A. Z., Zohkarnain, N. A., & Dena Sadewa, M. S. (2022). Historical Continuity and Changes: Understanding the Dynamics of Islamic Education in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Tarbiyatuna*, 13(2), 107–118. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v13i2.7345>
- Syarif, S., Abdullah, F., & Herlambang, S. (2024). Multiculturalism among Students in Madrasah: Knowledge, Challenges, and Social Capital. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 390–408. <https://doi.org/10.31538/nzh.v7i2.4710>